

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH NEGARA
VIETNAM TERHADAP KOMUNITAS LGBT**

SKRIPSI

*untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh :

AHMAD DANIL

1910852037



Pembimbing 1: Dr. Virtuous Setyaka, M.Si

Pembimbing 2: Putiviola Elian Nasir, S.S, MA

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Vietnam mengalami transformasi kebijakan yang signifikan terhadap komunitas LGBT sejak tahun 2013, dari sikap yang menolak menjadi lebih menerima. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana perubahan kebijakan pemerintah Vietnam terhadap komunitas LGBT dapat terjadi dalam sistem politik otoriter yang tradisionalnya resisten terhadap isu hak asasi manusia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan HAM LGBT di Vietnam dalam kurun waktu 2013 hingga 2022, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor pendorong dan mekanisme transformasi kebijakan yang terjadi. Studi ini menyoroti pergeseran posisi negara Vietnam terhadap isu LGBT, dari pelarangan eksplisit pernikahan sesama jenis dalam Undang-Undang Perkawinan hingga munculnya pernyataan resmi Kementerian Kesehatan yang menolak patologisasi homoseksualitas. Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis antara teori perubahan kebijakan, model intermestik Dyah Estu Kurniawati dan Advocacy Coalition Framework (ACF) Sabatier. Pendekatan intermestik menjelaskan bagaimana tekanan normatif dan dukungan internasional berkontribusi terhadap advokasi domestik melalui interaksi sub-sistem internasional dan domestik, sementara ACF menganalisis bagaimana koalisi aktor yang memiliki sistem kepercayaan berbeda bersaing dalam ruang kebijakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik. Temuan mengidentifikasi tiga faktor utama pendorong perubahan: tekanan normatif internasional, peran koalisi pro-LGBT, dan fungsi policy brokers pemerintah. Perubahan kebijakan terjadi melalui pembelajaran berbasis kebijakan dan kompromi strategis, menghasilkan transformasi bertahap seperti penghapusan larangan pernikahan sesama jenis dan legalisasi penggantian jenis kelamin. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan HAM dapat terjadi dalam sistem otoriter dengan adanya konvergensi antara tekanan internasional, koalisi advokasi yang strategis, dan broker kebijakan yang efektif.

Kata kunci: kebijakan public; LGBT; Vietnam; advocacy coalition framework; intermestik, HAM

ABSTRACT

Since 2013, Vietnam has experienced a notable shift in its policies regarding the LGBT community, moving from rejection to increased acceptance. This raises a critical question: how can such changes happen within an authoritarian regime that typically opposes human rights advancements? This research seeks to analyse the evolution of LGBT human rights policies in Vietnam from 2013 to 2022, focusing on the factors and mechanisms that have facilitated these changes. It highlights Vietnam's evolving stance on LGBT issues, notably the transition from the outright ban on same-sex marriage in the Marriage Law to official statements from the Ministry of Health denouncing the pathologisation of homosexuality. The study employs a synthesis of Dyah Estu Kurniawati's intermestic policy change theory and the Advocacy Coalition Framework (ACF) by Sabatier. The intermestic approach illustrates how international normative pressures and support influence domestic advocacy through interactions between global and local systems, while ACF examines how diverse coalitions compete within the national policy landscape. Key findings reveal three main drivers of change: international normative pressure, the influence of pro-LGBT coalitions, and the role of government policy brokers. The changes occurred through policy learning and strategic compromises, leading to significant developments such as the repeal of the same-sex marriage ban and the legalisation of gender reassignment. This research illustrates that human rights policy transformation is possible in authoritarian contexts through the alignment of international influences, strategic advocacy, and effective policy negotiation.

Keywords: public policy; LGBT; Vietnam; advocacy coalition framework; intermestic; human rights

